

POLITIK SEBAGAI REALISASI KEBEBASAN
(Kajian atas Filsafat Politik Hannah Arendt dan Implikasinya
bagi Pemikiran Politik Islam)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Filsafat Islam
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

AHMAD ABDUR ROHMAN
NIM : 00510212

JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004

Drs. H. MUZAIRI M.A
ALIM ROSWANTORO S.Ag, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Abdur Rohman
Lamp: 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Abdur Rohman

NIM : 005 10 212

Jurusan : Aqidah dan Filsafat

Judul Skripsi : Politik sebagai Realisasi Kebebasan (Kajian atas Filsafat Politik Hannah Arendt dan Implikasinya bagi Pemikiran Politik Islam).

Maka selaku pembimbing atau pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqosahkan.

Demikian mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Rabiul Akhir 1425 H
30 Mei 2004 M

Pembimbing II


Alim Roswanto S. Ag, M. Ag
NIP. 150 289 262

Pembimbing I


Drs. H. Muzairi M.A
NIP. 150 215 568



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/992/2004

Skripsi dengan judul : *Politik Sebagai Realisasi Kebebasan (Kajian atas Filsafat Politik Hannah Arendt dan Implikasinya bagi Pemikiran Politik Islam)*

Diajukan oleh :

1. Nama : Ahmad Abdur Rohman
2. NIM : 00510212
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, tanggal: 3 Agustus 2004 dengan nilai: 86/A- dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Agama dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abdul Basir Solissa, M. Ag
NIP. 150235497

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M. Ag
NIP. 150228024

Pembimbing/merangkap Penguji

Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150215586

Pembantu Pembimbing

Alim Roswantoro, M. Ag
NIP. 150289262

Penguji I

Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150228609

Penguji II

M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag
NIP. 150289206

Yogyakarta, 3 Agustus 2004
DEKAN



Drs. H.M. Fahmie, M. Hum
NIP. 150088748

MOTTO

Politisi hidup dalam dunia setengah kebenaran, kompleksitas, dan ketidakmurnian bukan karena ia adalah pembohong atau penipu tetapi karena itulah cara dia untuk menemukan dunia (Joyce Cary, 1995).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Ayah dan Ibunda tercinta
H. Ahmad Hambali (Alm.) dan Saudah Hambali (Kakek dan
Nenek)
Adik-adikku tersayang (Zakiyyah, Rory, Mahfud, Durroh,
Ifah, Rois, Ria)

Serta untuk semua yang mau membaca.....

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Sholawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan harapan dapat bermanfaat. Ada fenomena menarik yang perlu kita cermati bahwa sampai saat ini makna politik masih dipahami sebagai serba negatif. Hal ini tampak dalam ungkapan-ungkapan yang sering kali terlontar: “politik itu kotor”, “politik itu kejam”, “tak ada sahabat abadi dalam politik yang ada adalah kepentingan abadi”. Dunia politik akhirnya kerap kali dinilai kotor dan negatif, karena sikap-sikap dan perilaku manipulatif menjadi lumrah di dalamnya. Sementara itu pelaku politik menjadi maklum ketika dianggap tak ubahnya sebagai penyamun. Karena mementingkan kepentingan individu dan kelompoknya.

Sementara itu, wacana politik dalam kajian ilmiah pada umumnya bercorak negara-sentris atau pemerintah-sentris. Kajian politik berkisar seputar pertanyaan bagaimana munculnya negara, apa saja wewenang-wewenangnya, bagaimana ia mengatur warganya, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berputar pada perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara penguasa dengan yang dikuasai. Dengan demikian relasi dalam politik dipahami sebagai relasi dominasi serta pemaksaan. Tidak mengherankan jika wacana politik sering dihubungkan dengan perebutan kekuasaan, pertentangan, dan kekerasan disana-sini.

Kenyataan ini bukan tidak mungkin akan memiliki titik rawan. Rekonstruksi sejarah – meminjam istilah Taufik Abdulah – sepenuhnya tergantung pada sumber yang tersedia. Manakala sumber tersebut tidak kita miliki, bagaimana kita bisa

Kajian ini bermaksud mengapresiasi salah satu pemikiran Hannah Arendt. Memang tidak banyak yang kami lakukan dalam kajian ini. Namun, selain berbicara tentang nama dan peristiwa, luasnya jaringan intelektual serta kehidupan Hannah Arendt atas masalah-masalah aktual pada masanya, diharapkan ada hal penting yang dihasilkan dari upaya kajian ini. Setidaknya dari kajian ini dapat membawa kita pada ingatan sosial dan ingatan individual bahwa kengerian rezim totaliter sangat tidak manusiawi.

Dalam hal ini teks Hannah Arendt membuka kemungkinan untuk sebuah penelitian tentang relevansinya dengan masyarakat kita. Tidak kebetulan jika saya memilih teks Arendt, karena teks itu lumayan “lentur” dan dapat menjadi bahan latihan hermeneutis dalam komunikasi tindakan politis kita.

Kepada semua pihak yang memungkinkan penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih. Kepada Bpk. Drs. H. Muzairi, M.A dan Bpk. Alim Roswanto S.Ag, M.Ag selaku pembimbing skripsi ini. Atas waktu dan diskusi-diskusinya. Bpk. Drs. Abdul Basyir Solissa Penasehat Akademik, terima kasih atas saran dan kritiknya. Teman-teman kelas AF-2 '00 yang selalu memberikan inspirasi tentang pluralitas pemikiran “bahwa makna persahabatan lebih dari ungkapan kata dalam lirik lagu”. Warga kompleks Masjid Raudhatun Na’im (Mas Tri, Mas Sapto, “nyonge” Faisol, Imam, Galih). Teman-teman “begadang” Jl. Kusumawardani I (Hari “Iduth ‘e Dian” , Kholil el-Gibran, Mukh Robin Hut, Sugeng, Arie Ye Ye Ye, Saptu Ayu, Dian ‘e Iduth, Dhita and Ovit “My Inspiration”, atas kehangatan dan keintiman rasa persahabatan kalian semua. Keluarga besar Bani Amin di Jogja, terima kasih atas dukungan moral dan

materialnya. Keluarga Bpk. drh. H. Partiman dan Bpk. Jawahir Tontowi Ph.D (yang selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan tulisan ini). Keluarga Bpk. Drs. Dulrachman yang selalu menyambut hangat dan familiar serta atas “wejangan” filosofis kehidupan yang mencerahkan. Dik Dani, Dik Horis-Haidar yang selalu menyegarkan suasana dengan gaya lucu dan “kocak”nya. Yang jelas, utang tulisan ini lebih besar ketimbang ungkapan-ungkapan sekilas ini, mudah-mudahan kalian semua senantiasa ikhlas.

Teman-teman seperjuangan di PP. Sunan Pandan Aran (Mba’ Ait, Umi, Ratna, Sitir, Sriyati, Ashim, “Ipe” Arifah, Kang Fatah, Hali, Furqon) yang tergabung dalam Baker Fan’s Club. Buat “*arek-arek*” Gresik (Afifi, Akhsan, Syifa’) terima kasih banyak atas dukungannya. Serta buat Cak dan Ning “*Jauharo Syarqiyah*” semuanya saja terima kasih.

Lebih dari itu, ada banyak pihak yang secara tidak langsung membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Akhirnya skripsi ini disadari masih jauh dari kesempurnaan, namun tidak ada ungkapan yang paling sesuai untuk diungkapkan bahwa “hidup tanpa refleksi adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalani” sehingga untuk mencapai kesempurnaan kita tidak boleh takut untuk selalu mencoba.

Yogyakarta, 25 April 2004 M
05 Rabiul Awal 1425 H

Hormat Kami,

Penyusun

Ahmad Abdur Rohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul	12
C. Perumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II BIOGRAFI INTELEKTUAL HANNAH ARENDT DAN	
 KARYANYA	23
A. Biografi Hannah Arendt	23
B. Melacak Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt.....	27
C. Karya-Karya Hannah Arendt	32
BAB III KONSTRUKSI PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK HANNAH	
 ARENDR	36
A. Politik sebagai Realisasi Kebebasan	36
B. Runtuhnya Konsep Negara Bangsa	41
C. Munculnya Ruang Publik dalam Komunikasi Politik.....	48
D. Artifisialitas dalam Kehidupan Publik.....	51

BAB VI KONTEKSTUALISASI FILSAFAT POLITIK PADA PEMIKIRAN	
POLITIK ISLAM.....	59
A. Krisis Kekuasaan sebagai Krisis Berpikir.....	59
B. Peran Ingatan dalam Rehabilitasi Tindakan Politis	63
C. Aksi Politik: Membangun Budaya Politik Santun	68
D. Implikasi Filsafat Politik pada Pemikiran Politik Islam.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
CURRICULUM VITAE.....	89

ABSTRAK

Politik bukanlah kebijakan paternalistik penguasa atau superioritas kalangan elit pemerintah, tetapi merupakan suatu komunikasi publik dalam *civil society*. Sehingga politik dipahami bukan sebagai satu dominasi (*herrschaft*) atau otoriterisme, tetapi sebagai kebebasan (*freiheit*) dan komunikasi antar warga negara. Hannah Arendt adalah salah satu pemikir politik kontemporer terkemuka dari Jerman pada abad 20. Ia merupakan seorang pelarian Yahudi. Penguasaannya terhadap tradisi pemikiran politik Yunani kuno, terutama pengaruh Aristoteles jelas mewarnai dalam konstelasi pemikirannya. Namun demikian belum banyak kajian yang dilakukan atasnya. Umumnya pembahasan masih bersifat selintas, sambil lalu, ketika membedah sejarah filsafat politik.

Pendapat umum yang berkembang menyatakan bahwa karya-karya Arendt sangat mewakili fenomena kehidupan politik yang terus berkembang samapai saat ini, meski belakangan terbukti banyak kontroversi. Kuatnya pembacaan tersebut tercermin dalam buku-buku yang ditulisnya.

Teori politik Hannah Arendt yang mengambil inspirasi dari pemahaman Yunani kuno tentang *polis* yang memandang politik sebagai sebuah seni – *techne* – menjadi bagian dari aktivitas seni. Politik merupakan seni penampilan di mana seseorang dalam kebersamaan dengan orang lain saling menampilkan diri sehingga “aku tampil dilihat oleh orang lain sebagaimana aku juga melihat orang lain tampil di hadapanku.” Dalam penampilan itu – tindakan politik – manusia merealisasikan potensi tertinggi dari hakikat manusia: berbicara dan bertindak.

Teori yang dipakai adalah teori fenomenologi dan hermeneutik. Teori mengandaikan setiap bagian dari pelaku politik tidak berdiri sendiri. Ia merupakan rangkaian dari pelaku-pelaku politik (institusi politik). Dengan teori ini diharapkan akan terlihat tidak saja konteks yang terjadi disepertar masa kelahirannya, karakter yang dipilih penulisnya, tetapi juga adanya usaha untuk menemukan paradigma politik sebagai ruang publik dalam merealisasikan kebebasan yang hendak dikembangkan oleh penulisnya.

Ruang publik yang dimaksud dalam kajian ini adalah sebagai *ruang diskursif* yang bisa muncul kapan pun dan orang bertindak bersama-sama,

membentuk hubungan persamaan hak dan solidaritas, dan terlibat dalam proses deliberasi kolektif yang dimediasi oleh ucapan dan persuasi. Proses berpikir yang bertolak dari kebutuhan-kebutuhan konkrit, *setting cultural* dan *historis* masyarakat tempat sang tokoh.

Sebagai usaha untuk mengatasi kondisi keterasingan manusia dari kehidupan politik, nuansa 'perlawanan' akan terlihat. Setidaknya tercermin pada proses kreativitas maupun individualitas warga negara untuk membangun kembali ruang antara sebagai bentuk atas kembalinya kreatifitas berpikir dan berkomunikasi. Adanya kelemahan-kelemahan warga dalam membangun kembali rasa percaya diri (kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi) menjadi dalih adanya aksi politik sebagai realisasi kebebasan yang berusaha dikembangkan oleh Hannah Arendt dalam pemikiran dan karya-karyanya.

Di sisi lain, ia mengklaim bahwa proses merupakan akibat dari tindakan manusia yang tak terhindarkan, dan tindakan itu sendiri memiliki karakter mirip proses. Klaim ini tentu saja mengagetkan, karena bagi Arendt, salah satu ciri prinsipil dari tindakan adalah mengenal dari yang tak terduga, yang baru, dan yang tak bisa diramalkan. Oleh karenanya, hal ini pasti akan menghancurkan otomatisme yang diasosiasikan dengan gagasan tentang proses. Dalam banyak hal, kegiatan manusia digantikan oleh teknologi sebagai puncak dari pencarian manusia yang panjang untuk mengatasi kondisi alamiah. Untuk melepaskan diri dari status sebagai makhluk yang terkungkung bumi, manusia mengeksplorasi ruang dan mengimajinasikan pelbagai kemungkinan untuk menghuni planet-planet lain. Oleh karena itu, dunia modern muncul sebagai hal yang terlalu alamiah sekaligus terlalu terlalu artifisial, proses kehidupan spesies manusia terlalu banyak didominasi oleh kerja, dan sekaligus terlalu banyak didominasi oleh *techne*.

Concern yang menjadi kajian ini adalah persoalan-persoalan seputar pengertian ruang publik dan peran warga negara dalam kehidupan politik. Bukan hanya pada saat pemilu, melainkan ikut serta dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan publik. Asumsinya, kedua persoalan itulah yang membuat setiap tindakan warga negara akan memiliki makna dan arti yang sesungguhnya dalam

aktivitas politik yang akhirnya akan membebaskan warga negara dari sistem pemerintahan yang totaliter dan despotik.

Dengan demikian, Hannah Arendt mempertegas pendapat Aristoteles bahwa kategori pemaksaan dan kekerasan, juga dominasi (hubungan tuan-budak), sepenuhnya berada di luar *polis* dan menjadi kategori yang bukan politis. Dengan rumusan tersebut, Hannah Arendt menekankan bahwa aktivitas politis itu merupakan aktivitas antar manusia-manusia yang plural, masing-masing dengan keunikan dan kekhasannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa menurut Hannah Arendt, politik sebagai penampilan diri kepada orang lain, merupakan satu-satunya aktivitas yang menjadikan manusia sungguh-sungguh menjadi manusia dan menjamin seseorang berada dalam pengalaman akan relitas dunia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gambaran negara mutlak dan menakutkan itu bukan sekedar hasil imajinasi seorang filsuf yang sudah lepas landas, melainkan sebuah konsekuensi logis dari pengandaian-pengandaian filsuf tersebut. Kalau manusia tidak bertindak menurut apa yang dipahaminya sebagai masuk akal, melainkan dikendalikan oleh naluri-nalurnya, negara tidak dapat mengharap ketaatan para warga negara, karena mereka sadar dan memahami kewajaran suatu sistem hukum. Mereka hanya akan sadar dan taat kalau dorongan-dorongan irrasional mereka diimbangi dengan ancaman terhadap nyawa mereka. Kemutlakan wewenang negara adalah harga yang harus dibayar manusia agar ia dapat hidup dalam ketentraman, keteraturan, dan kedamaian.

Sehingga untuk menemukan bagaimana masyarakat harus ditata, jangan bertolak dari cita-cita dan keinginan-keinginan manusia, melainkan harus menganalisisnya sama seperti menganalisa sebuah jam dinding. Untuk mengetahui gerak-geriknya harus membukanya dan melihat bagaimana sambungan antar roda-roda bergigi, rantai-rantai, dan beban-beban. Begitu pula tentang manusia, ada sebuah pertanyaan yang harus diajukan: *what makes him tick?* Hobbes adalah filsuf pertama yang memahami manusia sebagai mekanisme belaka.¹

¹ Pandangan Hobbes merupakan radikalasi dari pandangan dualistik Rene Descartes (1596-1650). Menurut Descartes manusia terdiri dari dua bagian: roh dan tubuh mekanik. Hobbes mengesampingkan roh dan berpendapat bahwa manusia dapat dideskripsikan secara lengkap apabila diperlakukan sebagai mekanisme belaka. Untuk itu Hobbes mengadakan dua reduksi yang sangat radikal: (1) Hobbes mengesampingkan kebebasan kehendak manusia dan (2) Hobbes

Kekuasaan teraktualisasi saat orang-orang tetap saling berkomunikasi secara baik dan tulus. Sehingga lewat komunikasi itulah tercapai solidaritas bersama. Karena itu, kekuasaan dapat juga dipahami sebagai solidaritas politis para warga negara yang peduli pada persoalan bersama. Seperti diungkapkan Arendt:

*“Power is actualized only where word and deed have not parted company, where words are not empty and deeds not brutal, where word not used to veil intention but to disclose realities, and deeds are not used to violate and destroy but to establish relation and create new realities”.*²

Satu-satunya faktor material bagi dihasilkannya sebuah kekuasaan adalah “hidup bersamanya orang-orang” (*the living together of people*).³ Kekuasaan ada hanya jika orang-orang hidup dekat satu sama lain sehingga potensialitas untuk berkomunikasi selalu ada. Karena itu pembentukan kota, yang merupakan paradigma seluruh organisasi politik Barat, merupakan syarat pertama bagi kekuasaan. Namun, ada-bersama hanyalah membuat ada potensi kekuasaan. Kekuasaan baru teraktualisasi saat orang-orang yang ada bersama itu sungguh-sungguh berkomunikasi. Kekuasaan menjadi semakin ‘besar’ saat komunikasi itu berjalan lancar. Sebaliknya, seseorang, entah karena alasan apa, mengisolasi diri

mengembalikan segala kelakuan manusia pada satu dorongan saja. Lihat. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 203.

² Hannah Arendt, *The Human Condition* (New York: Doubleday & Company, Inc, 1959), hlm. 179.

³ *Ibid.*, hlm. 180.

dan tidak terlibat dalam hidup bersama, menghilangkan kuasa dan menjadikannya impoten.

Berhasil tidaknya sebuah institusi politik dalam menjaga ruang penampakan dan membuat warga negara tetap bebas untuk saling berkomunikasi, berkaitan langsung dengan legitimasi keberadaan institusi itu di hadapan warganya. Jika warga komunitas politis masih terus dapat berkomunikasi, berarti masih ada kekuasaan. Sebaliknya, jika warga komunitas politik itu sudah tidak mau dan tidak dapat berkomunikasi lagi, sesungguhnya institusi itu sudah tidak mempunyai legitimasi lagi. Institusi yang demikian itu hanya dapat dipertahankan lewat pemaksaan dan kekerasan. Dengan kata lain, kebersamaan warga komunitas politis itu, tidak lagi didasarkan pada kebebasan (*freiheit*) setiap warganya yang memang secara bebas memilih untuk berada bersama, tetapi mereka berada-bersama karena dipaksa oleh sebuah institusi yang menindas mereka.

Institusi yang demikian itu sesungguhnya sudah kehilangan kekuasaan (*power*). Satu-satunya alternatif kekuasaan adalah pemaksaan (*force*). Lewat pemaksaan ini, seseorang atau sekelompok kecil orang dapat memerintah atau memaksa orang lain. Lewat pemaksaan itu pula, seseorang atau sekelompok kecil orang dapat memonopoli kekerasan.⁴ Hal ini dijelaskan oleh Habermas:

“Every political order that isolates its citizens from one another through mistrust and suppresses the public exchange of their opinions degenerate

⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

into a domination based on violence. It destroys the communicative structures without which power cannot emerge".⁵

Hingga kini makna politik sering kali dipahami sebagai tindakan strategis, seperti pada konsep Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), Max Weber (1864-1920), atau Carl Schmitt (1888-1985). Tindakan politis dianggap sebagai bentuk pemaksaan atas kehendak oleh penguasa terhadap obyek kekuasaannya dengan cara apapun. Pemegang kedaulatan adalah siapapun yang mampu menentukan dalam keadaan darurat, sehingga situasi kacau-balau (*chaotic*) dan hiruk pikuk politik selalu dibuat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kacau politik akhirnya kerap dinilai kotor dan negatif karena sikap-sikap manipulatif menjadi lumrah di dalamnya⁶. Sementara itu para pelaku politik menjadi maklum jika dianggap tak ubahnya sebagai penyamun. Dalam kesadaran sebagai penyamun itu, *Homo homini lupus*, *Bellum omnium contra omnes*, dan *Clash of civilizations*⁷ menjadi bagian dari leksikon mereka dalam berpolitik.

⁵ Jurgen Habermas, *Hannah Arendt: On The Concept of Power (1976)* (London: Heinemann, 1983), hlm. 176.

⁶ Ismail Fahmi, *Tindakan Politis; Menimbang Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt*, Dalam: *Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, Jurnal Filsafat Driyarkara, edisi Th.XXVI, no. 1, September 2002 (Jakarta: Driyarkara Press 2002), hlm. 17.

⁷ *Homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya) dan *Bellum omnium contra omnes* (perang semua melawan semua) adalah dua istilah Thomas Hobbes (1588-1679) untuk menolak pandangan bahwa manusia sejak semula bersifat sosial, sambil menegaskan bahwa kecenderungan kodrati manusia adalah mempertahankan dirinya. Sedangkan *Clash of civilizations* (benturan peradaban) merupakan tesis Samuel P. Huntington yang populer di penghujung abad ke-20. Istilah Huntington tersebut mengingatkan pada dua istilah Hobbes di atas, karena ia berpendapat bahwa "kita tahu siapa diri kita hanya ketika kita tahu bukan diri kita, dan sering kali hanya ketika kita tahu siapa lawan kita", suatu pandangan Hobbesian yang meniscayakan sebuah bentuk peperangan. Lihat Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (London: Simon & Schuster, 1996), hlm. 21.

Diskripsi di atas tentu menyakitkan dahi setiap kita untuk kemudian bertanya: sedemikian bengiskah segala hal yang menyangkut perilaku politik itu? Adakah pemaknaan lain dari wacana politik yang bertolak dari rasa keadilan dan bersandar pada kesetaraan manusia yang lepas dari pemahaman para pelaku politik? Adalah Hannah Arendt (1906-1975) seorang filsuf perempuan berdarah Yahudi yang merefleksikan politik dengan titik pandang berbeda. Arendt mengajarkan bagaimana seharusnya politik diejawantahkan dalam pemahaman partisipasi dan aksi komunikasi warga dalam negara tanpa adanya suatu dominasi (*Herrschaft*).

Menurut Arendt⁸, mempertimbangkan kembali kondisi kemanusiaan dari titik pandang pengalaman manusia saat ini, yang berkenaan dengan refleksi dan keprihatinan atas ketumpulan dan ketidakmampuan manusia untuk berpikir kritis, sebagai suatu keberanian yang tanpa berpikir matang, kegundahan yang tak berpengharapan, persekongkolan dengan “kebenaran” kosong yang menjadi lumrah, kecenderungan pada kekerasan yang semakin akrab. Tindakan pasif dan tidak kritis seperti ini di masa lalu telah menyeret bangsa (manusia) ke pengalaman tragis rezim totaliter. Akankah pengalaman tersebut mengajari manusia untuk merasa jera dan tidak lagi mengulanginya? Arendt sangsi karena manusia cenderung memilih untuk abai pada sejarah. Pengalaman totalitarianisme, tukasnya, harus masuk dalam ingatan kolektif bahwa ia tidak boleh terulang kembali, dengan jalan selalu berupaya menghidupkan ruang publik dan mempertajam kesadaran kritis manusia. Paradigma pemikiran filsuf ini

⁸ Margaret Canovan, *Hannah Arendt on Hannah Arendt*, dalam M.A.Hill (ed.), *Hannah Arendt: The Recovery of the Public World* (New York: St. Martin's Press, 1979), hlm. 331.

mengajak kepada kesadaran warga negara untuk memikirkan tentang apa yang manusia lakukan, dengan pertama-tama merefleksikan aktivitas indrawinya: kerja, karya, dan tindakan.⁹

Arendt yang hidup di era totalitarisme Nazi Jerman itu memandang bahwa manusia itu sangatlah rapu. zamannya itu menaruh kecurigaan pada setiap pemikir yang muncul sebagai bersifat ideologis, sebuah masa traumatis yang terus membayang-bayangnya. Arendt yang mewarisi metode fenomenologi dari Heidegger (1889-1976)¹⁰ itu pun kelak lebih memilih untuk bersikap tak mau tahu terhadap setiap label yang ditempelkan padanya, sepertinya, sebuah karakter tipikal para pemikir sezamannya. Suatu kali dalam sebuah wawancara dengan Hans Morganthau, atas pertanyaan dimanakah posisinya dalam kancah pemikiran kontemporer (konservatif atau liberal), Arendt menjawab dengan datar:

"...Saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu dan tak pernah tahu. Dan saya kira saya tidak pernah berada dalam posisi manapun. Anda pun tahu kaum kiri menganggap saya konservatif dan kaum konservatif kadangkala menganggap saya kiri, atau entah apa lagi. Dan saya harus mengatakan bahwa saya tak peduli sedikitpun."¹¹

⁹ Ismail Fahmi, *Tindakan Plotis; Menimbang...*, hlm. 19.

¹⁰ Heidegger memperoleh gelar "doktor filsafat" pada tahun 1913 dengan disertasi tentang *Die Lehre vom Urteil im Psychologismus* (Ajaran tentang putusan dalam psikologisme). Ia merasa tertarik akan fenomenologi dan ia mempelajari dengan teliti semua karya Husserl. Husserl sendiri sangat menghargai kecerdasan filsuf muda itu dan mengangkat dia sebagai asistennya. Di kemudian hari Husserl menaruh harapan agar Heidegger akan menggantikan dia sebagai pemimpin Fenomenologi. Lihat K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer; Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 155-157.

¹¹ Margaret Canovan, *Hannah Arendt as a Conservative Thinker*, dalam Larry May et al (eds), *Hannah Arendt Twenty Years Later* (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1997), hlm. 11. Teks aslinya ("I don't know. I really don't know and I've never known. And I suppose I never had any such position. You know the left think that I am conservative, and the conservative sometimes think that I am left or I am maverick or God knows what. And I must say I couldn't care less.") Margaret Canovan mengutip wawancara tersebut dari *Hannah Arendt on Hannah Arendt*, dalam M.A. Hill (ed.), *Hannah Arendt: The Recovery of the Public World* (New York: St. Martin's Press, 1979), hlm. 333.

Dengan cara itu Arendt muncul dalam kancah teori politik, dengan mengusung konsep politik sebagai ruang kebebasan bagi warga negara dan berangkat dari titik tolak yang relatif lain. Ia datang pada masa di mana orang lazimnya mengejawantahkan politik sebagai konflik dan penguasaan, seperti konsepsi Machivellian, Hobbesian, Schmittian, atau konsepsi politik Weberian. Dalam konteks teori kepemimpinannya, Weber memandang bahwa kegiatan politik secara otentik adalah memutuskan untuk orang lain, memerintah mereka, menguasai mereka, dan mempengaruhi peristiwa. Akhirnya, politik secara esensial adalah apa yang diperbuat oleh seseorang bagi orang lain, dan karenanya politik berarti konflik. Pemahaman politik seperti inilah yang ditepis oleh Arendt; sebuah pemaknaan politik sebagai kegiatan yang *Fureinander* (monolog) atau *Gegeninander* (konfrontatif).¹²

Teori politik Arendt mengambil inspirasi dari pemahaman Yunani yang memandang politik sebagai sebuah *techne*, menjadi bagian dari aktivitas seni, khususnya seni penampilan.¹³ Dalam hal ini politik itu bagaikan sebuah pementasan drama. Politik merupakan seni penampilan di mana seseorang dalam kebersamaan dengan orang lain saling menampilkan diri sehingga “aku tampil dilihat oleh orang lain sebagaimana aku juga melihat orang lain tampil dihadapanku”.¹⁴ Sehingga yang dipentaskan dalam politik adalah tindakan dan

¹² George Kateb, *Political Action: Its Nature and Advantages*, dalam Dana Villa (ed.), *The Cambridge Companion to Hannah Arendt* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 132-133.

¹³ Hannah Arendt, *The Human...* hlm. 183.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

kata-kata sebagai bentuk kebebasan (*Freiheit*) dan komunikasi tanpa adanya suatu dominasi (*Herrschaft*). Tempat dari pementasannya adalah ruang publik.

Bertolak dari tradisi antik itu, Arendt membangun pemikirannya dengan sendi-sendi antinomi antara yang politis (*das Politische*) dan yang non-politis (*das A-Politische*). Yang politis – karena dimungkinkan oleh pemakaian bahasa dan tindakan manusia – adalah dalam lingkup kebebasan (*Freiheit*). “Bebas dan hidup dalam *polis*, adalah satu dan sama” demikian penegasan Arendt.¹⁵

Politik bukanlah sebuah kebijakan yang bersifat paternalistik pemerintahan atau bahkan superioritas kalangan elit, melainkan merupakan suatu komunikasi publik dalam *civil society*. Bagi Arendt, politik adalah tindakan yang merupakan wicara di ruang publik mengenai kepentingan bersama.¹⁶ Yakni sebagai aktivitas *miteinander* (dialog resiprositas), yaitu partisipasi semua warga dalam hidup bernegara. Paradigma ini merupakan interpretasinya atas kehidupan politik *polis-polis* Yunani abad ke-5 SM., terutama Athena, dan atas pemahamannya terhadap peristiwa-peristiwa aktual dalam kehidupan yang dijalaninya.

Bagi Arendt, ketertarikannya untuk merujuk pengalaman politik *polis*¹⁷ di masa Yunani klasik itu bukan karena alasan bahwa eksemplar masyarakat Athena

¹⁵ F. Budi Hardiman, *Politik dan Anti-Politik: Hannah Arendt Tentang Teori Krisis Negara*, (Jakarta: Driyarkara Press, 2001), hlm. 37-38.

¹⁶ George Kateb, *Political Action: Its Nature...* hlm. 133.

¹⁷ Konsep *polis* adalah sebuah konsep negara-kota pada masa Yunani yang memiliki ciri otonomi, swasembada (*autarkeia*) dan kemerdekaan. Plato menganggap bahwa *polis* yang ideal adalah berpenduduk tidak lebih dari 5000 warga. Kaum wanita, anak-anak, dan para budak tidaklah terhitung dalam warga *polis*. Baik Plato maupun Aristoteles menganggap orang-orang diluar *Polis* sebagai masyarakat Barbar yang tidak beradap. Kedua pemikir ini adalah filusf

hingga saat ini merupakan sebuah rezim yang terbaik, atau karena anggapan bahwa politik di masa itu bebas dari kekerasan brutal dan sikap pemaksaan sistemik terhadap wanita, budak, dan lainnya. Akan tetapi karena alasan yang sederhana, yaitu bahwa Athena merupakan tempat semai pertama pohon demokrasi yang berkecambah secara intens. Kehidupan politik warga Athena kala itu adalah sebuah politik dialog dan gagasan, politik pluralitas dan kesetaraan, serta politik kebebasan dan komunikasi.¹⁸

Athena memiliki arti penting bagi Arendt karena tidak hanya merupakan ibu kandung tradisi politik, tetapi juga filsafat (pemikiran) Barat. Dan Arendt mengangkat kembali fenomena masa lampau itu tidak untuk memantapkan keberlangsungan sejarah, namun dengan maksud – meminjam istilah koleganya, Walter Benjamin – “membangunkan yang mati”, dengan menampilkan tindakan sejarah masa lalu, “yang mati” itu, perlu dibongkar untuk kemudian mengais apapun yang berharga darinya.¹⁹

Namun demikian, Aristoteles salah seorang filsuf Yunani klasik yang kerap dirujuk Arendt sebetulnya dalam menulis karyanya, *Politics*,²⁰ sambil

terakhir yang membanggakan *Polis* sebagai institusi yang ideal. Lihat Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani. Dari Thales ke Aristoteles* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 20-5 dan 166-171.

¹⁸ Dana Villa, *The Development of Arendt's Political Thought*, dalam Dana Villa (ed.), *The Cambridge Companion to Hannah Arendt* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 9.

¹⁹ Jerome Kohn, *Freedom: The Priority of the Political*, dalam Dana Villa (ed.), *The Cambridge Companion to Hannah Arendt* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 114-115 dan 121.

²⁰ Aristoteles, *Politics*, terj. H. Rackham, (London: William Heinemann, 1967); Peter L. Phillips Simpson, *The Politics of Aristotle*, (Chapel Hill-London: The University of North Carolina Press, 1997). Kutipan-kutipan pendapat Aristoteles dalam karyanya *Politics* pada tulisan ini, merujuk pada buku *The Politics of Aristotle* karya Peter L. Phillips Simpson.

mengelak dari bayang-bayang peristiwa dan konteks Yunani di masanya. Aristoteles memang memaksudkan karya *Politics*-nya sebagai sebuah traktat filsafat mengenai fenomena alamiah hidup manusia yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun selama manusia berkehendak untuk mencapai *eudaimonia* (kebahagiaan).²¹

Ruang privat menjadi ruang dimana orang memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya demi kebutuhan sehari-hari dan untuk mempertahankan hidup. Tak ayal jika dalam ruang privat ini, terutama dalam masyarakat Yunani kuno, despotisme dan pemaksaan menjadi hal yang lumrah. Sedangkan ruang publik yang terejawantahkan dalam *polis* (negara) merupakan wahana penampakan kebebasan dan kesetaraan.²²

Dalam pemahaman tentang sifat tindakan (yang politis dan yang anti-politis) ini, Arendt menyebut dua kategori *Vita Activa*, kerja dan karya, ke dalam wilayah privat. Kerja adalah kegiatan manusia sebagai *animal laborans* yang berhubungan dengan produksi, sedangkan karya adalah aktivitas *homo faber* yang dalam banyak hal serupa dengan kerja, namun perbedaan keduanya adalah jika *homo faber* menghasilkan barang-barang yang tak lekas lekang yaitu berupa

²¹ *Ibid.*, hlm. xxi.

²² Bandingkan dengan konsep Marxian tentang masyarakat sipil (*civil society*) sebagai “moment” struktur yang dapat dipandang sebagai titik keberangkatan analisis Gramsci. Namun, Gramsci memperkenalkan tradisi baru: masyarakat sipil dalam konsep Gramsci tidak berada pada “moment” struktur, melainkan pada superstruktur. Superstruktur dibaginya menjadi dua bagian: “masyarakat sipil”, didefinisikan sebagai kumpulan organisme yang lazim disebut : “privat”, dan “masyarakat politik” atau “negara” yang lazim disebut “publik”. Dimana kedua tingkatan ini berkesesuaian dengan fungsi hegemoni, yang dilaksanakan kelompok dominan di seluruh masyarakat, dan juga “ dominasi langsung” yang diekspresikan secara langsung oleh negara dan pemerintahan “yuridis”. Lihat Listiyono Santoso, Sunarto, dkk., *Epitemologi Kiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), hlm. 77.

kebudayaan, sedangkan hasil produksi *animal laborans* akan segera hancur. Dalam kedua kegiatan di wilayah privat ini tidak ada hubungan komunikasi antar sesama, dalam arti relasi dialog dan aksi komunikasi yang mengandaikan kebebasan.²³ Sebagaimana Aristoteles, Arendt menyebut kedua kegiatan ini bersifat *a-politis*. Mengikuti Aristoteles yang memandang bahwa *Polis* mendahului *oikos* atau ruang publik harus didahulukan dari ruang privat,²⁴ Arendt pun lantas melihat bahwa kediktatoran dan totalitarianisme merupakan gejala dan akibat ekspansi *oikos* terhadap *polis*, kolonisasi ruang privat terhadap yang publik. Arendt mensinyalir bahwa politik kekerasan (kediktatoran) semacam ini merupakan akibat pemaknaan politik sebagai tindakan strategis (monolog), atau politik yang ditangani dengan mentalitas kerja.

Pandangan Aristoteles dan Arendt di atas seakan kembali mempertegas dimensi sosial manusia yang menunjukkan bahwa sosialitas manusia mendahului individualitasnya. Politik yang menurut Arendt adalah tindakan sebagai wicara di ruang publik mengenai kepentingan publik, menuntut penampakan individu (manusia) pada sosialitas dalam pluralitas. Penampakan manusia sebagai pribadi mengandaikan kebebasan yang membuatnya terlahir kembali. Karenanya tindakan politis merupakan sebuah konfirmasi bahwa seseorang pernah terlahir dan kemudian kembali terlahir dalam tindakannya. Manusia, kata Arendt, tidak terlahir bebas (*born free*) sebagaimana diyakini oleh Rousseau, tetapi terlahir

²³ Ismail Fahmi, *Tindakan Politis; Menimbang Pemikiran...* hlm. 34.

²⁴ Aristoteles berpendapat bahwa *oikos* lebih autarkis (*self sufficient*) dari pada individu, dan *polis* (negara) lebih autarkis dari pada *oikos*. "...the city is by nature prior to the house hold." Lihat Peter L. Phillip Simpson, *The Politics of Aristotle*, hlm. 11.

untuk kebebasan (*born for freedom*).²⁵ Maksudnya, keberadaan manusia adalah untuk bertindak, sebab tindakan merupakan subyek yang tepat bagi kisah manusia yang hanya menyerahkan sepenuhnya pada karakteristik (tindakan) ketidakpastian, spontanitas, dan ketakterdugaan. Antara tindakan dan kebebasan memang saling mengandaikan, dan keduanya menjadi leksikon wajib setiap kali membicarakan filsuf wanita ini.

Politik sebagai apresiasi nilai-nilai kebebasan dalam kerangka kerja (*frame Work*) pemikiran Hannah Arendt inilah yang akan penulis bahas dalam beberapa karya-karyanya. Dari sini penulis berharap akan mengetahui letak signifikansi kerangka paradigmatik pemikiran filsafat politik Hannah Arendt dalam kerangka akademis.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Untuk mengangkat pemikiran seorang tokoh filsafat politik kontemporer menyangkut masalah politik.
2. Keinginan untuk mengetahui dan mendalami gagasan-gagasan Hannah Arendt tentang problem pemerintahan di zaman rezim totalitarianisme Nazi Jerman.
3. Mengapresiasi pemikiran Hannah Arendt dalam kehidupan bernegara baik dalam ruang publik atau pun ruang privat.
4. Sebagai alat analisis terhadap pemikiran filsafat politik Hannah Arendt bagi pengembangan pemikiran filsafat politik secara akademis.

²⁵ Jerome Kohn, *Freedom: The Priority...* hlm. 114-115 dan 117.

C. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana dalam paparan di atas, maka untuk memberikan kejelasan arah pembahasan penulisan skripsi serta memberikan batasan pembahasan agar supaya persoalan tidak melebar sangatlah penting adanya rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dan secara rinci permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kebebasan dalam pemikiran filsafat politik Hannah Arendt ?
2. Bagaimana bentuk kritik atas krisis kekuasaan sebagai krisis berpikir bagi Hannah Arendt ?
3. Bagaimana implikasi filsafat politik terhadap pemikiran politik Islam sebagai institusi ataupun gerakan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dengan pemetaan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Memperkaya pemahaman terhadap pengertian filsafat politik menurut Hannah Arendt, terutama mengenai konsep politik sebagai realisasi kebebasan yang secara *an sich* memiliki arti penting dalam upaya untuk merehabilitasi wajah buram perilaku politik penguasa.
- b. Untuk memberikan penjelasan atas bentuk kritik Arendt terhadap krisis kekuasaan sebagai krisis berfikir dalam pemerintahan despotis yang bagi

Hannah Arendt hal ini merupakan preseden buruk bagi jalannya sebuah kekuasaan.

- c. Sebagai alternatif pemikiran untuk membebaskan warga negara dari kekangan dan dominasi politik oleh penguasa atau negara.

Di samping itu, penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan mengenai pemikiran-pemikiran filsafat politik kontemporer, sebagaimana yang ditawarkan oleh Hannah Arendt, lebih dari itu penulisan ini juga diharapkan memiliki nilai guna bagi upaya pengembangan wacana pemikiran politik di dunia Islam. Khususnya dalam pembelajaran politik yang sehat dan rasional.

E. Tinjauan Pustaka

Draft awal dari proyek penulisan “politik sebagai relisasi kebebasan” Hannah Arendt adalah berupa suatu buku yang ditulis pada tahun 1959.²⁶ Dalam tulisan ini, melalui kajian fenomenologis, Hannah Arendt menyatakan dengan tegas bahwa kebebasan adalah menjadi sejarah filsafat politik. Filsuf perempuan ini menulis bukan tentang sejarah pencapaian kebebasan, melainkan tentang sejarah hilangnya kebebasan.

Jika kita ikuti alur analisis pemikiran Arendt sejak awal sampai akhir, maka akan muncul struktur naratif tertentu yang menarik untuk diteliti. Penulis bercerita tentang sejarah politik dengan model kisah kejatuhan manusia pertama kedalam dosa yang terdapat dalam kitab genesis. Dosa asal itu bernama *techne*, yaitu

²⁶ Karya ini menjadi *masterpiece* Hannah Arendt yang dalam bahasa aslinya berjudul *Vita activa oder Vom taetigen Leben* dan terbit pertama kalinya pada tahun 1958. sedang terbitan dalam bahasa inggrisnya berjudul *The Human Condition* terbit pada tahun 1959.

rekayasa teknis, manipulasi obyek-obyek, pola hubungan sarana-tujuan. Lalu kisah selanjutnya, yaitu bangkitnya *Massengesellschaft* (masyarakat massa), tak lain daripada hasil merajalelanya *techne* yang kemudian menghancurkan *bios politikos* (kehidupan demokratis dalam *polis*).

Pola cerita ini tentu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Heidegger.²⁷ Manusia yang terlempar ke dunia ini perlahan-lahan dapat memahami eksistensinya lewat pemahaman (*verstehen*) akan dunianya (*welt*) dan komunitasnya (*mitwelt*). Pola narasi Heideggerian ini lalu oleh Arendt dibalik, yaitu di-negatif-kan: Jika *welt* (diartikan sebagai dunia sosial) itu hilang, individu merasa terisolasi dan tercerabut (*verlassen*), dan suasana hati (*stimmung*), keterlemparan (*geworfenheit*) itu muncul secara intensif. Itulah sisi pengalaman subyektif dari peroses lenyapnya ruang publik dalam rezim-rezim totaliter.

Negativitas dari teks itu dapat menimbulkan pertanyaan, mengapa Arendt hanya mendeskripsikan negativitas itu. Mengapa Arendt misalnya, tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan etis normatif dalam teksnya? Untuk apa menulis teks negatif? *L'art pour l'art*? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu harus ditemukan dalam sikap-sikap manusia, ketika mereka memiliki pengalaman negatif, yaitu penderitaan dan kengerian. Nazi Jerman lewat industrialisasi pembunuhan massal merupakan sebuah kengerian yang tak terbatas, dan menjadi lingkaran hitam (*black hole*) dalam sejarah kemanusiaan. Dalam situasi negatif semacam itu anjuran-anjuran etis kedengaran seperti hembusan angin.

²⁷ Mengenai kisah hubungan Arendt dengan Heidegger yang cukup rinci, salah satunya lihat catatan deskriptif Elzbieta Ettinger, *Hannah Arendt/Martin Heidegger* (New Haven-London: Yale University Press, 1995).

Fenomenologi menjadi wahana metodologis atas problem ini. Tapi strategi penulisan itu sendiri, seperti dikatakan Benhabib, merupakan *die erloesende Kraft des Erzählens* (kekuatan emansipatoris dari bercerita).²⁸

Dalam hal ini buku-buku Hannah Arendt membuka kemungkinan untuk sebuah penelitian tentang relevansinya dengan masyarakat dewasa ini. Tidak kebetulan ketika saya memilih karya Arendt untuk studi atas skripsi saya. Karya-karya Arendt lumayan “lentur” dan dapat menjadi bahan latihan hermeneutis kita dalam mensikapi kondisi pemerintahan yang despotik.

Selain buku di atas, yang mengulas pemikiran filsafat politik Hannah Arendt secara *holistic* juga sangat banyak, seperti *Filsafat Politik Hannah Arendt* yang ditulis oleh Maurizio Passerin d’Enteves,²⁹ dimana penulis buku ini tidak melakukan spesifikasi terhadap pemikiran filsafat politik Hannah Arendt. Sehingga secara luas teori-teori politik Arendt dibahas di buku ini. Ulasan tentang konsepsi modernitas Arendt juga mendapat porsi yang sangat luas dan tajam.

Maurizio menelusuri konsep kekuasaan Arendt yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa kekuasaan berada pada dasar setiap komunitas politik dan merupakan ekspresi dari suatu potensi yang selalu ada pada pelaku. Kekuasaan juga merupakan sumber vitalitas dan legitimasi bagi institusi politik dan

²⁸ Francisco Budi Hardiman, *Membaca “Teks Negatif” Hannah Arendt; Sebuah Pengantar*, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, *Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, edisi Th. XXVI, no. 1, September 2002 (Jakarta: Driyarkara Press 2002), hlm. 11.

²⁹ Maurizio Passerin d’Enteves, *Filsafat Politik Hannah Arendt* (Yogyakarta: Qalam, 2003). Pada buku ini penulis (Maurizio) tampaknya tengah mencoba merekonstruksi dan mengevaluasi filsafat politik Arendt secara kritis pada wilayah modernitas, teori tindakan, teori penilaian, dan konsep tentang kewarganegaraan. Pada buku ini tidak dibahas tentang kebebasan dalam politik, sebagai komunikasi warga dalam ruang privat dan ruang publik. Sehingga menurut saya perlu di telaah secara intens konsep Arendt tentang politik sebagai realisasi kebebasan.

pemerintahan, cara mereka untuk mentransformasikan dan mengadaptasikan keadaan baru dan merespon opini dan kebutuhan warga.

Jurnal filsafat Driyarkara, *Hannah Arendt dan Tindakan Politis*,³⁰ juga membahas pemikiran-pemikiran Arendt yang bersifat pengantar kearah filsafat politik. Sehingga tidak secara khusus mengapresiasi konsep Arendt tentang kebebasan. Namun ada sebuah tulisan yang sedikit memberikan ulasan tentang politik sebagai relisasi kebebasan yang ditulis oleh Sumarwan.

Selain itu juga, dalam Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Refleksi Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin,³¹ penulis hanya menguraikan secara singkat teori-teori pemikiran dan karya-karya pokok Hannah Arendt. Sehingga pendalaman atas konsep Arendt tentang politik sebagai relisasi kebebasan perlu diperluas dan dipertajam. Serta sejumlah artikel lainnya dalam websait-websait yang juga tidak secara spesifik membahas makna politik sebagai realisasi kebebasan.

Haryatmoko dalam bukunya *Etika Politik Dan Kekuasaan*,³² memberikan penjelasan mengenai pendasaran filosofis dalam konstruksi budaya politik santun ini dibutuhkan setidaknya tiga kriteria yang mampu menjembatani dari teori ke praksis: pertama, memberi orientasi normatif bagi perwujudan kondisi politik yang manusiawi; kedua, memberi alternatif bagi penafsiran orientasi normatif itu agar bisa diterapkan dalam hukum positif yang mendukung penerimaan pluralitas;

³⁰ Jurnal Filsafat Driyarkara, *Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, edisi Th. XXVI, no. 1, September 2002, Jakarta.

³¹ Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Refleksi, Vol. 3, No. 2, Juli 2003, Yogyakarta.

³² Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003).

dan ketiga, berkembangnya sikap kritis terhadap semua manifestasi dominasi, terutama yang menggunakan kedok rejim wacana tertentu.

Dalam buku *Titik Temu Agama dan Politik*,³³ penulis menemukan korelasi positif antara politik dan agama. Dalam hal ini, Islam bukan hanya sekedar konsep yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan, akan tetapi Islam adalah suatu konsep yang berlandaskan kebenaran obyektif. Kenyataan ini pertamakali muncul dalam konsep Islam tentang dunia luar yang bisa disaksikan dan difikirkan oleh manusia.

Buku *Titik Temu Agama dan Politik* karya Mahdi Fadulullah ini, lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep Islam yang dikaitkan dengan konsep politik, sehingga sangat sedikit sekali pembahasan tentang pengertian politik dalam Islam. Dalam hubungannya dengan konsep kekuasaan ia menjelaskan bahwa, ciri khas masyarakat Islam yang terpenting adalah pengenalan individu-individunya dengan masyarakat yang lain, akhirnya terwujudlah perkenalan umat Islam antara sebagian dengan sebagian yang lain secara menyeluruh. Setelah itu terjadilah kesepakatan memilih seseorang untuk memegang kekuasaan atau kekhalifahan.³⁴

Berdasarkan survey di atas, kiranya perlu dilakukan penelitian atau penulisan yang mengkhususkan kajian pada pemikiran Hannah Arendt tentang kebebasan, dimana politik sebagai komunikasi sebuah komunitas. Sekaligus memperkenalkan pemikiran “berani” Hannah Arendt tentang problem kenegaraan

³³ Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik, Analisa Pemikiran Sayyid Qutub*, (Ramadhani: Solo, 1991).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 124.

totaliter dan otoritarian sebagai sebuah rezim yang despotis. Dengan latar belakang sejarah pemerintahan rezim Nazi Jerman.

F. Metodologi Penelitian

Maksud dari metode adalah supaya kegiatan peraktis penelitian terlaksana secara rasional dan terarah, agar memperoleh hasil yang optimal serta semaksimal mungkin. Secara kategorial, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) model penelitian kultural, ide-ide serta gagasan-gagasan sebagai produk dari proses berpikir manusia. Dalam kategorisasi Anton Bakker, penelitian ini merupakan penelitian filsafat dengan model *Historis Faktual* mengenai tokoh, yang berhubungan dengan lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya, maupun dalam perjalanan sejarah hidupnya sendiri.³⁵ Dengan pemikiran Hannah Arendt sebagai obyek materialnya, dan konsep politik sebagai realisasi kebebasan sebagai obyek formal dari penelitian ini. Uraian yang akan penulis paparkan dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analitik*.³⁶ Oleh karena itu, disamping untuk mengkonstruksi pemikiran politik Arendt secara gambalang, sebagai penelitian atas konsep (*Conceptual Inquiry*), kajian pemikiran ini diarahkan pula secara mendalam kepada kajian analisis melalui apa yang disebut sebagai "*conceptual analysis*" (analisis konseptual). Dengan demikian konsep sebagai struktur kompleks yang kemudian diungkap

³⁵ Anton Bakker, dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 70.

³⁶ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 10.

elemen-elemennya dengan mengasumsikan analisis tentang bagaimana keterkaitan antara elemen-elemen tersebut.

Adapun metode-metode yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Penekanan pada metode ini difokuskan pada hasil-hasil pemikiran sang tokoh, yang di ambil dari buku-buku utamanya, adapun untuk tehnik pengumpulan data di bagi menjadi dua bagian: pertama, data utama yang berhubungan langsung dengan karya-karya Hannah Arendt. Dan tulisan-tulisan lain yang secara langsung berhubungan dengan pemikirannya tentang politik sebagai relisasi kebebasan. Kedua, data pendukung, untuk data-data sekunder adalah tulisan-tulisan dari para penulis lain yang membahas pemikiran Hannah Arendt baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Deskriptif*, yaitu cara untuk mendapatkan informasi, keterangan, proposisi-proposisi, konsepsi-konsepsi, dan hakeket yang sifatnya mendasar, atau memberikan uraian secara teratur dan runtut dalam menganalisa seluruh konsep pemikiran yang akan kita teliti.
- b. *Interpretasi*, pemikiran tokoh tersebut diselami dengan setepat mungkin untuk menangkap arti dan nuansa uraian yang kita teliti. Agar tercapai pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusiawi dari sang tokoh. Dimana unsur interpretasi ini merupakan landasan bagi metode

hermeneutika. Dalam interpretasi itu termuat hubungan-hubungan atau lingkaran-lingkaran yang beraneka ragam, dengan bertumpu pada *evidensi obyektif*.

- c. *Heuristik-analitik*, yaitu dengan melakukan pendekatan secara konsepsional atas makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang kita gunakan dalam penulisan dan atas pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Dan sedapat mungkin diusahakan untuk mendapatkan pemahaman lebih luas atau yang serba baru. Dengan demikian mungkin juga dapat disajikan konsepsi alternatif yang orisinal dan yang dapat menunjukkan jalan pemecahan baru.

Dari pengolahan data-data tersebut penulis menggunakan pendekatan *Political Philosophy*. Dengan pendekatan *Political Philosophy* diharapkan akan menemukan makna reflektif-kritis terhadap perilaku politik warga dalam membangun ruang publik. Sebagai ruang wicara untuk membebaskan warga negara dari dominasi kekuasaan yang despotik. Serta memberikan makna yang sesungguhnya terhadap perilaku politik dalam kehidupan bernegara.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam proses kemudahan untuk memahami dan mendapatkan suatu hasil yang utuh (*integrated*), serta mampu memberikan penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan uraian yang sistematis dan teratur. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yang terbagi menjadi beberapa sub bab untuk membedakan dalam pembahasan.

Bab I, pendahuluan, sebagai pengantar dalam pembahasan skripsi secara keseluruhan (*holistic*), pada bagian ini mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, diuraikan tentang biografi kehidupan intelektual Hannah Arendt yang mencakup; Latar belakang pendidikan intelektualnya, corak pemikirannya yang Aristotelian, serta karya-karyanya.

Bab III, membahas tentang konstruksi pemikiran filsafat politik Hannah Arendt yang meliputi; Teori tindakan sebagai pembebasan warga dalam ruang publik, dan observasi kritis Hannah Arendt terhadap pemerintahan yang otoritarian, juga tentang runtuhnya konsep negara-bangsa serta pemahaman Hannah Arendt tentang artifisialitas kehidupan publik.

Bab IV, Mengungkapkan secara analisis-kritis rekonstruksi atas kediktatoran dan totalitarianisme kekuasaan rezim Nazi Jerman, yang mencakup; kondisi krisis kekuasaan sebagai krisis berpikir, dilema negara-bangsa dalam perspektif Hannah Arendt, serta peran ingatan dalam rehabilitasi tindakan politis. Dan juga implikasi filsafat politik dalam pemikiran politik Islam kontemporer.

Bab V, merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan yang telah lalu, beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah sebagai berikut, bahwa tanggung jawab dan kebebasan politik ini akan menyadarkan pentingnya menumbuhkan budaya politik yang santun. Budaya politik semacam ini dimaksudkan untuk membangun kondisi politik yang manusiawi bukan kondisi hegemonik; penindasan, kekerasan, dan korupsi. Setidaknya ada tiga bentuk pendasaran filosofis bagi pembangunan budaya politik itu: Pertama, menciptakan dan memberdayakan ruang publik, wahana yang memungkinkan penerimaan pluralitas yang didasarkan pada ingatan sosial. Kedua, perlunya pendasaran institusi dan hukum. Ketiga, perlu ditumbuhkan sikap kritis dan bentuk-bentuk perlawanan terhadap semua manifestasi dominasi kekuasaan. Indikasi inilah yang kemudian oleh Arendt dinilai sangat penting ketika akan menuju proses perubahan kearah politik sebagai realisasi kebebasan.

Pembacaan seperti ini saat itu belum pernah dilakukan – setidaknya berdasarkan atas data yang sampai saat ini tersedia. Format pemikiran yang ada sebatas pada teori-teori kekuasaan yang melanggengkan penindasan dan teror. Salah satu implikasi dari pola pemikiran semacam itu adalah munculnya pemahaman dan kesadaran yang terbelenggu. Upaya pemikiran “berani” Arendt dapat dipahami sebagai ikhtiar untuk membuka kesadaran baru dalam pengejawantahan politik yang mengandaikan kebebasan dan pluralitas secara utuh. Hal ini menjadi sangat penting, karena pada saat kondisi kemanusiaan

teralienasi dari dunia dimana dia tinggal dan berkomunikasi dengan sesama warga negara. Mungkin itulah (salah satu) upaya ia menemukan kembali makna kebebasan politik sebagai kebebasan komunikasi warga negara.

Meski secara keseluruhan pemikiran Arendt dipengaruhi oleh tradisi Yunani kuno, ia tetap memberikan kritik tajam atas praktek politik yang terjadi pada saat itu dan tidak berarti pemikirannya sama sekali melepaskan dirinya dari persoalan hidup yang berkecamuk dalam masyarakatnya. Selain karena tuntutan formalnya, Perhatian atau keterlibatan Hannah Arendt terhadap persoalan zamannya saat itu tampak lebih dikarenakan keprihatinannya sebagai warga negara atas kondisi carut marut akibat tekanan penguasa yang totaliter dan despotik.

Perhatian tersebut tampak misalnya pada pemikiran Arendt tentang pentingnya ruang publik sebagai ruang komunikasi warga untuk memperdebatkan kepentingan dan tujuan bersama. Tanpa melihat perbedaan dan dengan menumbuhkan kekuatan berpikir sebagai landasan membangun kembali pemerintahan. Arendt ingin mengumandangkan paradigma baru tentang kekuasaan, yaitu paradigma kekuasaan bersama.

Secara garis besar Arendt menawarkan penafsiran baru tentang politik dan kekuasaan yang didasarkan atas nilai-nilai persamaan, kebebasan, komunikasi, dan pluralitas. Sehingga akan memunculkan apresiasi ruang politik yang santun. Dimana setiap warga negara akan mengejawantahkan nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap orang lain, baik di wilayah privat maupun di wilayah publik. Secara umum pemikiran filosofis-politis harus melakukan kritik terhadap

kemapanan atau *satatus quo* kekuasaan yang membelenggu kebebasan warga negara dalam melakukan aksi komunikasi antar mereka, demi untuk kemajuan dan kreativitas warga negara untuk membangun institusi politik yang *good governmant*. Di mana setiap unsur politik memiliki peran yang sama dalam mengembangkan dan membangun masyarakat yang kritis, masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi tanpa terintimidasi dan terisolasi dari komunitasnya, yaitu sebagai warga negara.

B. Saran-Saran

Sebagaimana hasil dari pembacaan di atas setelah diperhatikan, maka di sini akan kami kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Membangun budaya politik dalam kerangka menuju masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menerima dan memahami arti pluralitas sebagai bagian dari tindakan politik sudah seharusnya diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Upaya ini dalam rangka memperkenalkan suatu bentuk aksi politik yang santun, yang menghargai kehadiran orang lain sebagai bagian dari komunikasi politik. Tanpa adanya pemahaman seperti ini akan sangat mudah masyarakat kita terjebak dalam pemahaman politik yang sempit, sehingga mudah terjadi tindakan-tindakan politik yang anarkis. Dalam hal ini Hannah Arendt menawarkan paradigma politik dengan mengandalkan unsur pengampunan dan janji sebagai upaya untuk melakukan rehabilitasi politik serta menghindarkan tindakan main hakim sendiri.

2. Problem politik kontemporer dalam membangun suatu masyarakat untuk memiliki kesadaran politik yang baik sangat berat tantangan dan hambatannya. Dimana faktor budaya dan tradisi yang berkembang sangat terpengaruh oleh warisan kultur masa lalu. Dari sini perlunya melakukan pengkajian ulang terhadap sejarah kebudayaan dan pemikiran kita dengan semangat kritis, obyektif, rasional, dan historis. Dari sini pula kita kan melakukan perubahan dari masyarakat yang rendah akan pemaknaan tindakan politik menuju masyarakat yang sadar politik, kita perlu mencobanya untuk membangun sebuah babak baru yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih baik dan tercerahkan.

Demikianlah paparan tentang politik sebagai relisasi kebebasan dalam pemikiran filsafat politik Hannah Arendt. Terlepas dari kekurangannya, tulisan ini merupakan hasil dari usaha yang maksimal dalam penyusunannya sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan serta mengejawantahkan sistem politik yang santun dengan cara pandang terhadap dunia dan pelakunya secara kritis, obyektif, dan rasional. Meski demikian pada akhirnya sebuah kebenaran itu ada dalam pikiran kita masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah, *The Human Condition*, New York: Doubleday & Company, Inc, 1959.
- , *Teori Kekerasan*, terj. Ghafna Raiza W., Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP), 2003.
- , *Asal-usul Totalitarianisme*, terj. Alois Agus Nugroho, Jilid I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- , *Asal-usul Totalitarianisme*, terj. Alois Agus Nugroho, Jilid II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- , *Asal-usul Totalitarianisme*, terj. J.M Soebijanta, Jilid III, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Aristoteles, *Politics*, terj. H. Rackham, London: William Heinemann, 1967.
- Azra, Azyumardi, *Politik Indonesia Kontemporer; Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Adeline M.T., *Hannah Arendt Seorang Pesimis? Secercah Optimisme Hannah Arendt dalam Teorinya Mengenai Kemampuan Memaafkan Berdasarkan The Human Condition (1958)*, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, *Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, edisi Th. XXVI, no. 1, September 2002, Jakarta.
- Al-Ja'bary, Hafizh Muhammad, *Gerakan Kebangkitan Islam; Studi Literatur Gerakan Islam Kontemporer dan Teori dalam berbagai Gerakan Reformis Islam*, terj. Abu Ayyub Al-Anshari, Solo: Duta Rohmah, 1996.

- Asy'arie, Musa, *Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Bertens, Kees, *Sejarah Filsafat Yunani. Dari Thales ke Aristoteles*, Yogyakarta: Kanisius, cet. Ke-15, 1999.
- , *Filsafat Barat Kontemporer, Prancis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- , *Filsafat Barat Kontemporer, Inggris-Jerman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bernstein, Richard J., *The Development of Arendt's Political Thought*, dalam Dana Villa (ed.), *The Cambridge Companion to Hannah Arendt*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2000.
- Canovan, Margaret, *Hannah Arendt as a Conservative Thinker*, dalam Larry May et.al (eds), *Hannah Arendt Twenty Years Later*, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1997.
- D'Enteves, Maurizio Passerin, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Drucker, Peter, *Masyarakat Pasca Kapitalis*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1997.
- Ettinger, Elzbieta, *Hannah Arendt/Martin Heidegger*, New Haven-London: Yale University Press, 1995.

- Fahmi, Ismail, *Tindakan Politis; Menimbang Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt*, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, *Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, edisi Th.XXVI, no. 1, September 2002, Jakarta.
- Fadulullah, Mahdi, *Titik Temu Agama Dan Politik; Analisa Pemikiran Sayyid Qutub*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Habermas, Jurgen, *Hannah Arendt: On The Concept of Power (1976)*, London: Heinemann, 1983.
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* London: Simon & Schuster, 1996.
- Hardiman, Francisco Budi, *Politik dan Anti-Politik : Hannah Arendt Tentang Teori Krisis Negara*, Jakarta: Driyarkara Press, 2001.
- , *Membaca "Teks Negatif" Hannah Arendt; Sebuah Pengantar*, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, *Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, edisi Th. XXVI, no. 1, September 2002. Jakarta.
- , *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Irawan, P. Bambang, *Peran Ingatan dalam Rehabilitasi Tindakan Politis*, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, *Hannah Arendt dan Tindakan Politis* edisi Th. XXVI, no. 1, September 2002, Jakarta.

- Kateb, George, *Political Action: Its Nature and Advantages*, dalam Dana Villa (ed.), *The Cambridge Companion to Hannah Arendt*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Kohn, Jerome, *Freedom: The Priority of the Political*, dalam Dana Villa (ed.), *The Cambridge Companion to Hannah Arendt*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Milan Kudara, *Kitab Lupa dan Gelak Tawa*, Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- M.A.Hill (ed.), *Hannah Arendt: The Recovery of the Public World*, New York: St. Martin's Press, 1979.
- Nugroho, Ito Prajna, *Dilema Negara-Bangsa dalam Perspektif Hannah Arendt*, dalam *Jurnal Filsafat Driyarkara, Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, edisi Th. XXVI, no. 1, September 2002, Jakarta.
- Popper, Karl R., *Gagalnya Historisisme*, terj. Nena Suprpto, dan Ignas Kleden, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Rikardus, Rahmat, *Hannah Arendt; Krisis Kekuasaan Sebagai Krisis Berfikir, Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, dalam *Jurnal Filsafat Driyarkara, Hannah Arendt dan Tindakan Politis*, edisi Th. XXVI, no. 1, September 2002, Jakarta.

- Rohman, Ahmad Abdur, dalam Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman *Refleksi, Politik Sebagai Realisasi Kebebasan: Mengkaji Filsafat Politik Hannah Arendt*, Vol 3, No. 2, Juli 2003, Yogyakarta.
- Simpson, Peter L. Phillips, *The Politics of Aristotle*, Chapel Hill-London: The University of North Carolina Press, 1997.
- Santoso, Listiyono, Sunarto, dkk., *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.
- Shindunata, dalam *Basis, Melik Nggendong Lali*, No. 11-12, Tahun ke-50, November-Desember 2001, Yogyakarta.
- Simbolon, Parakitri T., dalam *Tempo, Matinya Negara – Bangsa ?* Edisi Akhir Tahun 25 Desember 2001, Jakarta.
- Spencer, Robert, *Islam Ditelanjangi; Pertanyaan-pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim*, terj. Mun'im A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Villa, Dana, *The Development of Arendt's Political Thought*, dalam Dana Villa (ed.), *The Cambridge Companion to Hannah Arendt*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Wahid, Abdurrahman, *Membangun Demokrasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Lampiran-Lampiran

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Abdur Rohman

Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 22 Agustus 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Belum Kawin

Nama Orang Tua : a. Ayah : Muhamad Sufnan Abdul Aman

b. Ibu : Ruqoyyah El-Widad Hambali

Alamat Asal : Jl. Palapa No. 48 Rt. 06/ Rw. III Betoyo Kauman Manyar
Gresik Jawa Timur 61151 Tlp. (031) 3957582.

Alamat Yogyakarta : Kompleks Masjid Raudhatun Na'im Jl. Pamularsih 48
Rt.06/Rw.38 Kelaseman Sinduharjo Ngaglik Sleman
Yogyakarta 55581 Phone. (0274) 884426. HP.
08170411066.

Riwayat Pendidikan :

TK Al- Hidayah Manyar Gresik, tamat tahun 1985

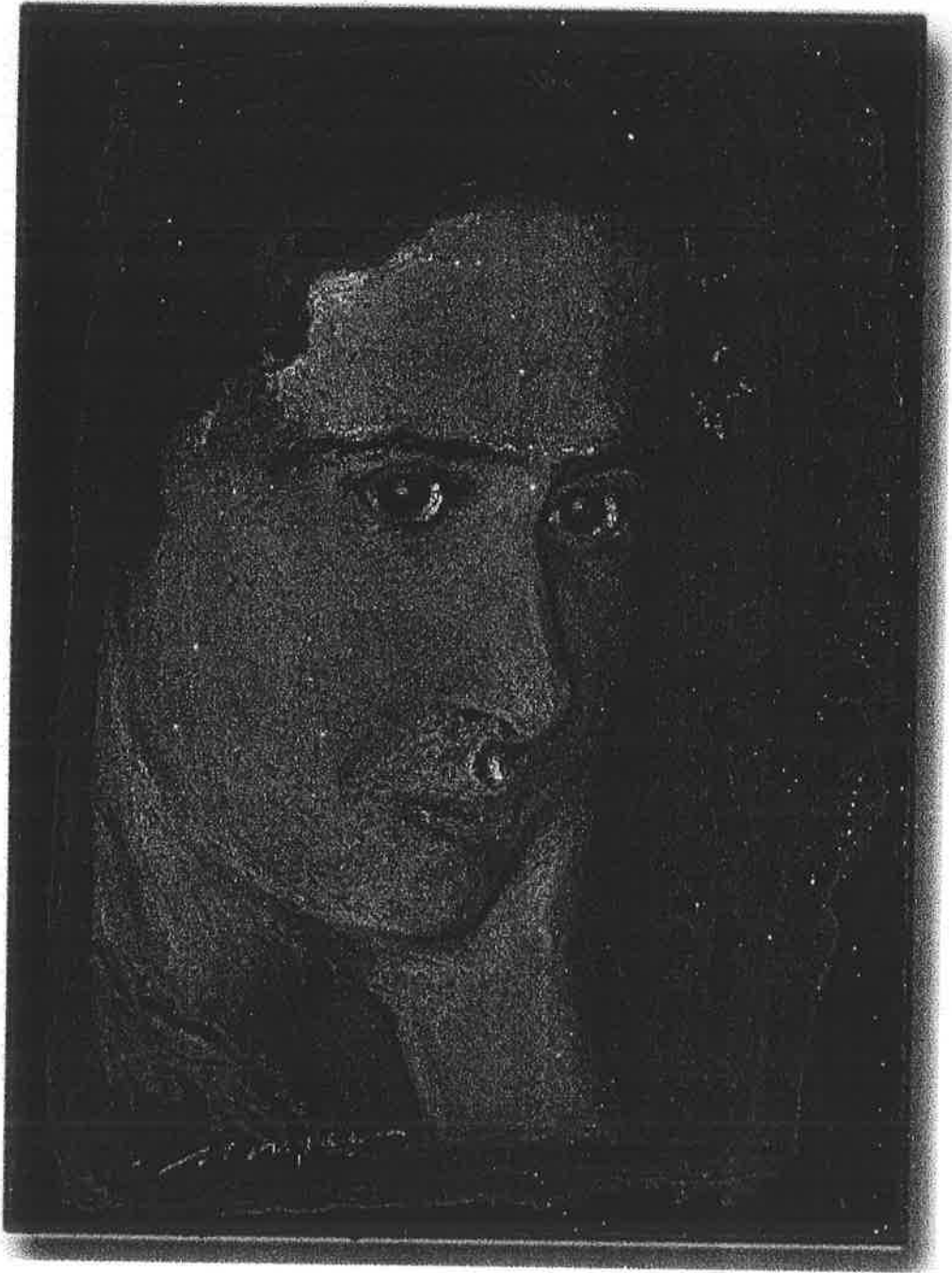
MI Al- Hidayah Manyar Gresik, tamat tahun 1991

MTs. Al- Hidayah Manyar Gresik, tamat tahun 1994

SMU Assa'adah Qomaruddin Bungah Gresik, tamat tahun 1997

Masuk Jur. AF, Fak. Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000

Hannah Arendt



(1906-1975)